KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Cemari lingkungan, sampah plastik masuk ke laut
Tanggal : Senin, 08 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cemari Lingkungan

Sampah Plastik Masuk Ke Laut

WAKIL Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menuntaskan masalah pengelolaan sampah. Pasalnya, pengelolaan sampah masih menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan.

Anggota Fraksi NasDem DPR itu mengungkapkan, produksi sampah yang mencapai 60 juta ton memerlukan perhatian serius. Apalagi, sekitar 17 persen dari sampah tersebut adalah plastik.

"Kurang lebih hampir 10 juta dari sampah itu masuk ke laut dan sebagian besarnya adalah plastik. Indonesia ada di nomor dua terbesar sampah plastik di laut kita," kata Sugeng, Minggu (7/9/2025).

Menurutnya, pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi pembuangan sampah terbuka atau open dumping. Itu membuat potensi pencemaran lingkungan, memicu penyakit, dan risiko bencana makin besar.

Sebagai pihak yang ikut menandatangani Paris Agreement tentang perubahan iklim, Indonesia berkewajiban untuk berperan menekan emisi. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah yang baik.

"Karena gas metan itu 20 kali lipat lebih mencemari dari karbondioksida. Pemerintah harus melakukan langkah yang diperlukan," paparnya.

Sugeng juga meminta seluruh jajaran KLH turun ke lapangan. Banyak pejuang pengelolaan sampah membutuhkan perhatian dan apresiasi.

"Para pejuang tersebut membuat tugas para pemangku kepentingan jadi lebih ringan," ujar legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII itu.

Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menyoroti pendanaan pengelolaan sampah nasional yang diperkirakan mencapai Rp 280 triliun hingga 2029 untuk membangun infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah nasional. Angka itu bisa diakses melalui lembaga pembiayaan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Ateng, kebutuhan pendanaan sebesar itu seharusnya bukan sekadar anggaran bagi pengelolaan sampah yang bersifat "habis pakai", tapi harus menjadi anggaran yang bersifat komersial. ■ PYB